

## Kebijakan Sudan Menyepakati Perjanjian *Abraham Accords* dengan Israel Tahun 2021

Azmie Savira<sup>1\*</sup>, Zulkifli Harza<sup>2\*</sup>, Maryam Jamillah<sup>3\*</sup>

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Andalas, Kota Padang, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>azmiesavira5@gmail.com\*, <sup>2</sup>zharza@soc.unand.ac.id\*,  
<sup>3</sup>maryamjamillahmj73@gmail.com\*

### Abstrak

Pada tahun 2021, Sudan dan Israel secara resmi menandatangani Perjanjian *Abraham Accords* yang berisi kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Sudan dan Israel sebelumnya tidak pernah menjalin hubungan karena keberpihakan dan dukungannya terhadap Palestina serta sebagai anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Adanya kesepakatan tersebut mengejutkan banyak pihak karena sejak awal Sudan telah menunjukkan perlawanannya terhadap Israel. Keputusan tersebut juga membuat Sudan mendapatkan berbagai respon negatif karena dianggap telah mengkhianati usaha dan perjuangan kemerdekaan Palestina dari Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Sudan menyepakati Perjanjian *Abraham Accords*. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep *Rational Actor Model* oleh Graham T. Allison. Ada pun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis eksplanatif dengan memanfaatkan data sekunder. Berdasarkan konsep yang digunakan, penelitian ini menemukan bahwa mengapa Sudan menyepakati perjanjian tersebut karena besarnya keuntungan yang akan didapat Sudan dibandingkan kerugiannya, seperti memperkuat hubungan bilateral dengan Israel dan Amerika Serikat, membuka peluang kerja sama dan bantuan dari negara lain, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, penghapusan Sudan dari daftar *state sponsor terrorism* oleh Amerika Serikat di mana penghapusan ini dapat membuka peluang hubungan, kerja sama dan bantuan dari negara-negara sekutu Israel dan Amerika Serikat serta adanya dukungan politik dari Israel dan Amerika Serikat.

### Abstract

*In 2021, Sudan and Israel officially signed the Abraham Accords Agreement which contains an agreement to normalize relations with Israel. Sudan and Israel have never established relations because of their support for Palestine and as members of the Arab League and the Organization of Islamic Cooperation (OIC). This agreement was surprising because Sudan had shown its resistance and made Sudan receive various negative responses because it was considered to have betrayed the struggle for Palestinian independence from Israel. This research aims to analyze why Sudan agreed to the Abraham Accords and is analyzed using the concept of the Rational Actor Model by Graham T. Allison. The method used is an explanatory qualitative type using secondary data. Based on this concept, it is found why Sudan agreed to this agreement, namely because of the large benefits that Sudan will gain, such as strengthening relations with Israel and the United States, opening up opportunities for cooperation and assistance from other countries, including the United States and its allies, eliminating Sudan from state sponsors of terrorism which can open up opportunities for*

*cooperation and assistance from allied countries, Israel and the United States, as well as political support from these two countries.*

**Keywords: Abraham Accords, Agreement, Foreign Policy, Israel, Sudan**

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 6 Januari 2021, Sudan menandatangani Perjanjian *Abraham Accords* yang berisi normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Presiden Sudan Abdalla Hamdok. Sudan menjadi negara Arab setelah Turki, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Selain itu, perjanjian ini juga memuat poin kerja sama berbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, imigrasi, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demokrasi.

Kesepakatan tersebut mengejutkan banyak pihak karena Sudan dan Israel memiliki hubungan yang buruk selama berpuluh tahun yang disebabkan oleh dukungan Sudan yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang dapat dilihat dari keanggotaan Sudan dalam Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain itu, perjanjian ini menimbulkan kecaman seperti Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan normalisasi beberapa negara Arab terhadap Israel yang dianggap melanggar resolusi KTT Liga Arab dan OKI, Prakarsa Perdamaian Arab (*The Arabs Peace Initiative*) dan Resolusi DK PBB nomor 1515 tahun 2003 tentang penyelesaian konflik Israel-Palestina.<sup>1</sup> Selain itu, Sekjen OKI Yusuf Al-Utsaimin juga menolak karena normalisasi tidak bisa dilakukan sebelum Israel menghentikan penjajahan atas Palestina.<sup>2</sup> Tidak hanya itu, masyarakat Sudan melakukan demonstrasi dan partai politik Sudan membentuk oposisi menentang keputusan tersebut. Oleh karena itu, terdapat alasan tertentu yang menyebabkan perubahan keputusan Sudan tersebut, karena selama ini Sudan telah menunjukkan pertentangan terhadap Israel, namun secara tiba-tiba

---

<sup>1</sup> Security CGAouncil of United Nations, "Resolution 1515", November 19, 2003, diakses pada Mei 4, 2022, <https://undocs.org/S/RES/1515>

<sup>2</sup> Ulum, 101.

membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga hal ini menarik untuk diteliti.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari bahan tertulis berupa tulisan yang diperoleh dari pernyataan resmi, jurnal, dokumen dan penelitian sebelumnya ataupun data sekunder lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif di mana penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menyelidiki, dan menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan hubungan sebab-akibat antara variabel dependen dan variabel independen yang bertujuan menelaah penyebab suatu fenomena terjadi.<sup>3</sup> Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengetahui alasan Sudan menyepakati Perjanjian *Abraham Accords* yang berisi upaya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel padahal sebelumnya Sudan dan Israel sendiri telah memiliki hubungan yang buruk selama berpuluh tahun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada kasus ini, ditemukan bahwa Pemerintah Sudan telah melakukan perubahan kebijakan yaitu dengan menandatangani kebijakan *Abraham Accords* yang dijelaskan dalam tiga sub-bab yakni *Goals & Objectives*, *Alternatives & Consequences*, dan *Choice*. Sub-bab pertama adalah *Goals & Objectives*. Dalam menandatangani dan meratifikasi Perjanjian *Abraham Accords* tersebut, Sudan ingin memperoleh hasil yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Rational Actor Model* oleh Graham T. Allison. Menurut Allison, setiap aktor akan melakukan

---

<sup>3</sup> Moleong, 17

pertimbangan rasional dalam mengambil keputusan agar meraih keuntungan secara maksimal.

Teori *Rational Actor Model* (Model Aktor Rasional) merupakan teori yang menjelaskan proses terbentuknya suatu keputusan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara maksimal di mana pemerintah sebagai instrumen kebijakan yang dianggap sebagai seorang individu yang memiliki pemikiran dan nalar yang rasional dalam membentuk, menentukan dan mengubah kebijakan.<sup>4</sup> Pemikiran dan nalar tersebut didasarkan pada berbagai fakta yang memperkuat pembentukan dan perubahan kebijakan luar negeri, meskipun kebijakan tersebut terkadang bertentangan dengan peraturan internasional. Pembentukan atau perubahan kebijakan luar negeri suatu negara tersebut akan selalu beriringan dengan kepentingan nasionalnya, sehingga diperlukan berbagai jalan dan alternatif kebijakan dalam pelaksanaannya agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.<sup>5</sup>

Pada model ini, pemerintah merupakan *decision maker* dan kebijakan beserta alternatifnya dibentuk berdasarkan konsep *cost and benefits*. Pemilahan *cost and benefits* kebijakan tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan dalam pencapaian kepentingan nasional negara, sehingga kebijakan yang dibentuk akan sesuai dengan kepentingan nasional suatu negara. Ada pun tahap pertama dalam proses pembentukan kebijakan suatu negara adalah menentukan tujuan dan sikap negara dalam menghadapi serta memberikan reaksi terhadap suatu isu dimana kemudian pembuat kebijakan akan membuat pertimbangan dan memeriksa semua aspek, seperti dari segi keuntungan, manfaat dan preferensi di mana proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikenal

---

<sup>4</sup> Elinor Ostrom, "A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Science Association, 1997", *American Political Science Review* 92. No 1, (1998): 3

<sup>5</sup> Graham T. Allison dan Morton H. Halper, "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications. Theory and Policy in International Relations", *The Johns Hopkins University Press* 24, (2015): 41

dengan istilah *decision making process* dengan mempertimbangkan setiap konsekuensi.

Allison mengatakan bahwa *goals* adalah tujuan umum atau mendasar dan *objectives* yaitu tujuan khusus untuk mendukung tercapainya *goals*. Dalam menetapkan tujuan, *decision makers* akan menentukan pertimbangan yang dilihat dari keuntungan, preferensi atau kegunaan dan kepentingan.<sup>6</sup> Dalam *Abraham Accords*, *goals* dan *objectives* Sudan dalam menyepakati perjanjian dengan Israel yang ditengahi oleh Amerika Serikat tersebut adalah memperkuat hubungan dengan Israel dan Amerika serta negara-negara sekutunya. Selain itu, keikutsertaan Sudan dalam perjanjian ini diharapkan dapat membuka peluang yang dapat menguntungkan dan memenuhi kepentingan nasional Sudan, seperti adanya rencana penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung teroris (*state sponsor terrorism*) yang diberikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1993 di mana Sudan diduga berhubungan dengan kelompok yang dianggap sebagai teroris oleh Amerika Serikat seperti, Hamas, Hizbullah dan Al-Qaeda.<sup>7</sup> Hal ini kemudian berujung pada pemberlakuan sanksi berupa embargo ekonomi pada tahun 1997 oleh Amerika Serikat terhadap Sudan.<sup>8</sup>

Masuknya Sudan dalam daftar ini telah merugikan Sudan dalam berbagai aspek, seperti menyebabkan Sudan tidak memiliki akses ke sistem perbankan internasional selama hampir tiga decade, pembekuan aset pemerintah, dan pembatasan ketat pada lembaga keuangan yang berurusan dengan Sudan, pelarangan transaksi apa pun yang menggunakan mata uang atau produk Amerika Serikat dan menghentikan bisnis Sudan yang beroperasi di Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan (mencakup berbagai aspek vital mulai

---

<sup>6</sup> Graham T. Allison, "The Essence of Decision", 1971.

<sup>7</sup> "Sudan and Terrorism, Hearing Before the Subcommittee on African Affairs of The Committee on Foreign Relations United States Senate, One Hundred Fifth Congress, First Session", U.S Department of State.

<sup>8</sup> "US Lifts Economic Sanctions on Sudan", VOA, Oktober 6, 2017, diakses pada Mei 5, 2022, <https://www.voanews.com/a/us-lifts-economic-sanctions-sudan/4059945.html>

dari pesawat terbang hingga peralatan kesehatan) dengan Sudan.<sup>9</sup> Pada tanggal 14 Desember 2020, Sudan akhirnya dihapus dari daftar *state sponsor terrorism*<sup>10</sup> di mana penghapusan ini membuka peluang baru, yaitu

Penghapusan Sudan sebagai daftar *state sponsor terrorism* ini memberikan jalan dan berbagai keuntungan lain seperti bantuan asing dari Amerika Serikat di mana USAID menyetujui pembayaran sebesar 20 juta dollar kepada World Food Programme untuk menyediakan pengiriman gandum sebesar 65.000 metrik ton ke Sudan dan gandum tersebut telah sampai bulan Desember 2020.<sup>11</sup> Bantuan ini merupakan salah satu bantuan Amerika Serikat di Sudan yang berjumlah hampir 437 juta dollar dalam bantuan kemanusiaan pada Tahun Anggaran (*Fiscal Year*) 2020, termasuk lebih dari 32 juta dollar untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan lebih dari 50 juta dollar dalam pembiayaan pembangunan pada Tahun Anggaran (*Fiscal Year*) 2019 dan menjadikan Amerika Serikat sebagai sponsor bantuan terbesar ke Sudan.<sup>12</sup> Berkat bantuan tersebut, akhirnya Sudan dapat menyelesaikan tunggakan hutang kepada *International Development Association* (IDA). Pembayaran hutang tersebut memungkinkan Sudan untuk terlibat secara penuh dengan Grup World Bank setelah hampir tiga dekade, dapat menerima keringanan utang luar negeri di mana pada tanggal 29 Juni 2021, International Monetary Fund dan World Bank menyetujui kelayakan Sudan untuk keringanan utang di

---

<sup>9</sup> Malik M, Malik M , “The Efficacy of United States Sanctions on the Republic of Sudan, Journal of Georgetown,” *University-Qatar Middle Eastern Studies Student Association* (2015):7 <http://dx.doi.org/10.5339/messa.2015.7>

<sup>10</sup> “Bilateral Relations Fact Sheet, Bureau of African Affairs, U.S Relations with Sudan”, U.S Department of State.

## 11

“\$20 Million in Wheat Provided Through USAID Grant Arrives in Sudan,” United States Agency International Development, December 16, 2020, diakses pada Mei 3, 2022, <https://2017-2020.usaid.gov/news-information/press-releases/dec-16-2020-united-states-delivers-20-million-wheat-sudanese-people>

<sup>12</sup> “\$20 Million in Wheat Provided Through USAID Grant Arrives in Sudan,” United States Agency International Development.

bawah Prakarsa *Heavily Indebted Poor Country (HIPC) Initiative*.<sup>13</sup> dan membuka jalan bagi Sudan untuk mengakses hampir 2 miliar dollar hibah IDA untuk mengatasi kemiskinan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>14</sup>

Berbagai perubahan besar dalam hubungan Sudan-Amerika Serikat membuka peluang kerja sama dan bantuan lain dari Amerika Serikat untuk memberikan dukungan yang lebih kuat untuk reformasi yang lebih di Sudan. Selain itu, dengan membingkai hubungan Sudan dan Israel dalam sebuah bentuk normalisasi dengan baik akan memberikan kekuatan kepada kedua negara dalam mencapai kepentingan bersama dalam konteks regional. *Abraham Accords* bukan hanya berkaitan dengan normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel saja, namun juga merupakan sebuah kerja sama yang lebih komprehensif dalam berbagai bidang, sehingga dengan disepakatinya perjanjian ini, maka akan meningkatnya intensitas kerja sama dan memperkuat hubungan bilateral antara Sudan dan Israel.

Sub-bab kedua membahas tentang Alternatives & Consequences Sudan dalam Menyepakati Perjanjian Abraham Accords (Cost & Benefits) yang dibagi kembali menjadi dua bagian yaitu, keuntungan dan kerugian Sudan dalam Menyepakati Abraham Accords. Pertama keuntungan Sudan dalam menyepakati Abraham Accords. Menurut Allison, pilihan yang telah diambil oleh dua atau lebih negara, didasari oleh kepentingan dan keuntungan yang ingin diraih. Sudan telah mempertimbangkan konsekuensi dengan menelaah *cost and benefits*, sehingga negara tersebut mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Ada pun pertimbangan Sudan dalam menyepakati Abraham Accords seperti keadaan dan kondisi domestik Sudan saat ini yang kian memburuk,

---

<sup>13</sup> "Frequently Asked Questions on Sudan," International Monetary Fund, diakses pada Mei 8, 2022, <https://www.imf.org/en/Countries/SDN/frequently-asked-questions-on-sudan>

<sup>14</sup> "Sudan Clears Arrears, Gains Access to \$2 Billion in New World Bank Financing", World Bank, Maret 26, 2021, diakses pada Mei 8, 2022, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/26/sudan-clears-arrears-gains-access-to-2-billion-in-new-world-bank-financing>



adanya berbagai gelombang pembukaan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh beberapa negara Arab dengan Israel, serta adanya kemungkinan dan keuntungan yang dijanjikan oleh pihak Israel dan Amerika Serikat. Ada pun keuntungan tersebut yaitu pertama, campur tangan dan keikutsertaan Amerika Serikat dalam perjanjian *Abraham Accords* ini dapat memberikan peluang dan keuntungan bagi Sudan, yakni penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme Amerika Serikat yang dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di mana pada tanggal 14 Desember 2020, Sudan akhirnya dihapus dari daftar *state sponsor terrorism*. Lalu, penghapusan Sudan dari daftar *state-supported terrorism* dapat membuka dan memperkuat hubungan bilateral antara Sudan dengan Israel dan Amerika serta membuka peluang kerja sama antara Sudan dengan negara sekutu Israel dan Amerika Serikat.

Bagian kedua membahas tentang Kerugian Sudan dalam Menyepakati Perjanjian *Abraham Accords*. Terjalannya hubungan Sudan dan Israel ini menciptakan dampak negatif bagi Sudan, seperti munculnya kecaman dan penolakan di antaranya dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan normalisasi beberapa negara Arab terhadap Israel yang dianggap melanggar resolusi KTT Liga Arab dan OKI, Prakarsa Perdamaian Arab (*The Arabs Peace Initiative*) dan Resolusi DK PBB nomor 1515 tahun 2003 terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina.<sup>15</sup> Sekjen OKI Yusuf Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa normalisasi tidak bisa dilakukan sebelum Israel menghentikan penjajahan atas Palestina.<sup>16</sup> Masyarakat Sudan melakukan demonstrasi dan jajaran partai politik Sudan juga membentuk

---

<sup>15</sup> Security Council of United Nations, "Resolution 1515", November 19, 2003, diakses pada Mei 4, 2022, <https://undocs.org/S/RES/1515>

<sup>16</sup> Ulum, 101.

oposisi menentang perjanjian tersebut.<sup>17</sup> Selain itu, menurut jajak pendapat *Palestinian Center for Policy and Survey Research*, 80 persen orang Palestina menganggap normalisasi tersebut adalah pengkhianatan terhadap cita-cita Palestina bersama negara Arab.<sup>18</sup> Tidak hanya itu, dalam perjanjian *Abraham Accords* ini, Amerika Serikat memang menawarkan untuk menghapus Sudan dari daftar *state-supported terrorism*, namun dengan syarat Sudan harus membayar Sudan sebesar 335 juta dollar kepada para korban dan keluarga individu yang terkena dampak pemboman tahun 1998 di Kedutaan Besar AS di Tanzania dan Kenya, serangan tahun 2000 di USS Cole, dan pembunuhan seorang karyawan USAID di Khartoum sebagai syarat dan imbalan timbal balik dari penghapusan dari daftar tersebut.<sup>19</sup>

Tabel 4.2 Variabel Data Analisis Kasus Dengan Teori

No.	Variabel	Deskripsi
1	<i>Goals and Objectives</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Upaya perbaikan hubungan bilateral Sudan, Israel dan Amerika Serikat serta sekutunya</li><li>2. Upaya meningkatkan kerja sama dalam berbagai aspek dan sektor</li></ol>

**17**

“Ignition of new war:’ Sudan political parties reject Israel deal”, Aljazeera, Oktober 24, 2020, diakses pada Mei 5, 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/sudans-political-parties-reject-israeli-normalisation-deal>

<sup>18</sup> Palestinian Center for Policy and Survey Research, “Public Opinion Poll No (77)”, September 15, 2020, diakses pada Mei 2, 2022, <https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2077%20English%20full%20text%20September2020.pdf>

**19**

“Sudan's listing as sponsor of terrorism ended by US”, BBC, December 14, 2020, diakses pada Juli 7, 2022, <https://www.bbc.com/news/world-africa-55300252>

		<p>secara komprehensif antara Sudan, Israel, Amerika Serikat dan sekutu serta seluruh negara dan organisasi internasional</p> <p>3. Upaya Sudan dalam mempersiapkan diri pada persaingan di lingkup global</p>
2	<i>Alternatives &amp; Consequences</i>	<p><i>Benefits :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat hubungan bilateral dengan Israel dan Amerika Serikat</li> <li>2. Membuka peluang kerja sama dan bantuan dari negara lain, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya</li> <li>3. Penghapusan Sudan dari daftar <i>state sponsor terrorism</i> oleh Amerika Serikat di mana penghapusan ini dapat membuka peluang hubungan, kerja sama dan bantuan dari negara-negara sekutu Israel dan Amerika Serikat</li> <li>4. Dukungan politik dari Israel dan Amerika Serikat</li> </ol> <p><i>Cost :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retaknya hubungan Sudan dengan</li> </ol>

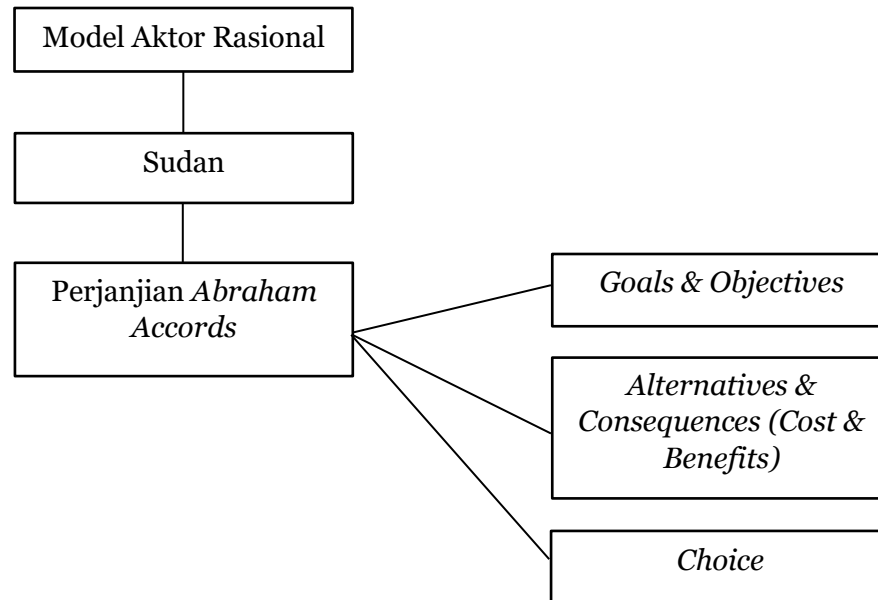
		<p>Palestina</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Rusaknya hubungan Sudan dengan negara dan organisasi yang mendukung perdamaian dan keadilan bagi Palestina</li><li>1. Sudan harus membayar uang kompensasi terhadap keluarga korban pengeboman dan penyerangan Kantor Kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998 sebagai syarat penghapusan Sudan dari daftar <i>state-supported terrorism</i> sebanyak kurang lebih 335 juta dollar.</li></ol>
3	<i>Choice</i>	Menyepakati normalisasi hubungan dalam Perjanjian <i>Abraham Accords</i> dengan Israel memiliki banyak <i>benefit</i> dan sejalan dengan tujuan nasional Sudan

Sumber : Diolah oleh peneliti

Ada pun tahap akhir dari bagian analisis ini adalah *choice*. Pembuat kebijakan akan menentukan pilihan sesuai dengan tujuan negara. Kebijakan juga akan dipertimbangkan berdasarkan rasionalitas demi mencapai tujuan.

*Choice* merupakan keputusan yang paling memungkinkan untuk dipilih dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir konsekuensi.

Melalui pendekatan model aktor rasional, peneliti telah menganalisis bagaimana kepentingan nasional Sudan dalam menormalisasi hubungan dengan Israel. Keputusan Sudan tersebut dianggap sebagai sebuah pilihan rasional dengan mempertimbangkan *cost and benefits* dari keputusan yang diambil. Melalui pendekatan aktor rasional, peneliti akan melihat bagaimana Sudan merumuskan kebijakan luar negerinya melalui normalisasi hubungan dengan Israel dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untung dan rugi yang akan didapatkan setelah menyepakati perjanjian dan meraih kepentingan nasionalnya secara maksimal. Berdasarkan asumsi peneliti, peneliti menggunakan model analitik dalam menjawab pertanyaan “Mengapa Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel?” yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1.7 : Model Analitik Kebijakan Sudan Menyepakati Perjanjian Abraham Accords dengan Israel 2021**

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kebijakan Sudan yang menyepakati Perjanjian *Abraham Accords* yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada tanggal 6 Januari 2021. Penelitian ini menggunakan konsep *Rational Actor Model* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison dengan menggunakan tiga indikator, yaitu *Goals and Objectives*, *Alternatives and consequences* dan *Choices*. Berdasarkan penyajian data dan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan Sudan menyepakati Perjanjian *Abraham Accords* tersebut adalah sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan kebijakan

tersebut merupakan kebijakan yang rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan oleh Sudan. Keuntungan yang akan didapatkan Sudan lebih besar dibandingkan kerugian yang akan ditanggung jika Sudan menyepakati Perjanjian *Abraham Accords*. Namun, di sisi lain juga terdapat kerugian yang akan Sudan dapatkan. Selain itu, Sudan harus mempersiapkan strategi yang tepat agar dapat memaksimalkan hasil dalam pemanfaatan Perjanjian *Abraham Accords* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book

Moleong, Lexo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

### Journal Article

Malik M, Malik M. “The Efficacy of United States Sanctions on the Republic of Sudan.” *Journal of Georgetown University: Qatar Middle Eastern Studies Student Association*, 2015. <http://dx.doi.org/10.5339/messa.2015.7>.

Halperin, Graham T. Allison and Morton H. “Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications.” *Supplement: Theory and Policy in International Relations: Cambridge University Press* 24 (1972).

Ostrom, Elinor. “A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Science Association, 1997.” *American Political Science Review* 92, no. 1 (1998).

Research, Palestinian Center for Policy and Survey. “Public Opinion Poll No (77).” *Palestinian Center for POLICY and SURVEY RESEARCH*, 2020.

Ulum, Muhammad Bachrul. “Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomati Israel- Sudan : Antara Kepentingan Nasional Dengan Solidaritas Pembebasan Palestina.” *Icmes* 5, no. 1 (2021): 88–107.

Halperin, Graham T. Allison and Morton H. “Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications.” *Supplement: Theory and Policy in International Relations: Cambridge University Press* 24 (1972).

### **Webpage with an Author**

Development, United States Agency International. “\$20 Million in Wheat Provided Through USAID Grant Arrives in Sudan,” 2020. <https://2017-2020.usaid.gov/news-information/press-releases/dec-16-2020-united-states-delivers-20-million-wheat-sudanese-people>.

Bank, World. “Sudan Clears Arrears, Gains Access to \$2 Billion in New World Bank Financing,” 2021. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/26/sudan-clears-arrears-gains-access-to-2-billion-in-new-world-bank-financing>.

### **Newspaper article**

Aljazeera. “Ignition of New War: Sudan Political Parties Reject Israel Deal,” 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/sudans-political-parties-reject-israeli-normalisation-deal>.

BBC. “Sudan’s Listing as Sponsor of Terrorism Ended by US,” 2020. <https://www.bbc.com/news/world-africa-55300252>.

VOA. “US Lifts Economic Sanctions on Sudan,” 2017. <https://www.voanews.com/a/us-lifts-economic-sanctions-sudan/4059945.html>.

### **Government Publication**

Affairs, Bureau of African. “U.S. Relations With Sudan: Bilateral Relations Fact Sheet.” Accessed June 7, 2022. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-sudan/>.

States, United. “Sudan and Terrorism, Hearing Before The Subcommittee On African Affairs of The Committee On Foreign Relations United States Senate, One Hundred Fifth Congress, First Session,” 1997.